



Dadang Solihin  
Rektor Universitas Darma Persada



# Administrasi Pembangunan di Indonesia

Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan



Program Doktor Bidang Ilmu Sosial Universitas Pasundan  
Bandung, 20 Januari 2018



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus dengan pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2015 ia dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com), HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>



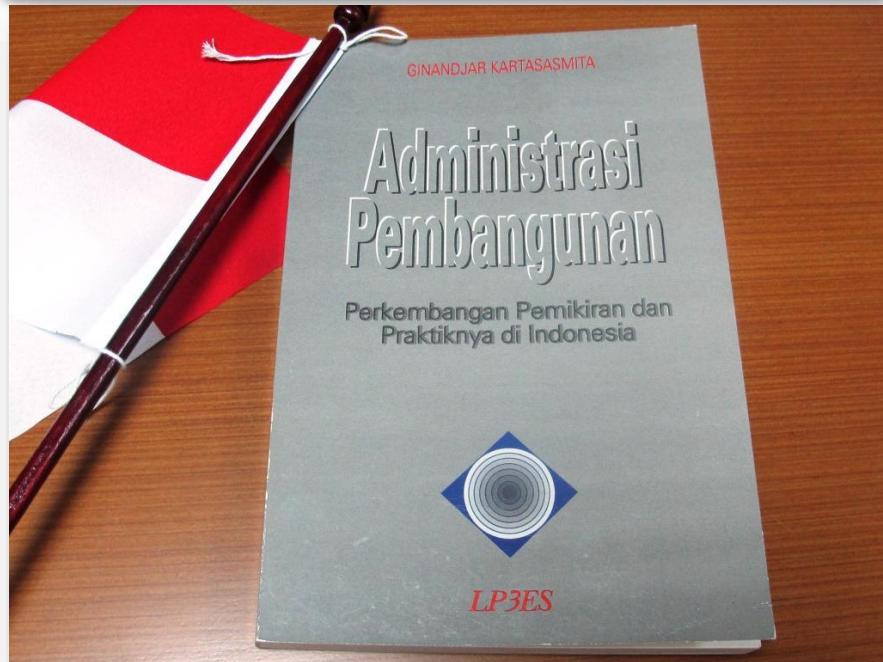
# Materi

- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
- Siklus Manajemen Pembangunan
- Planning
  - Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
  - Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Barat
  - Kegagalan Perencanaan
- Budgetting
- Implementation
  - Praktek Korupsi di Indonesia
- Monev



# Bahan Bacaan Wajib: Administrasi Pembangunan di Indonesia (Bab 5, hal 93-162)

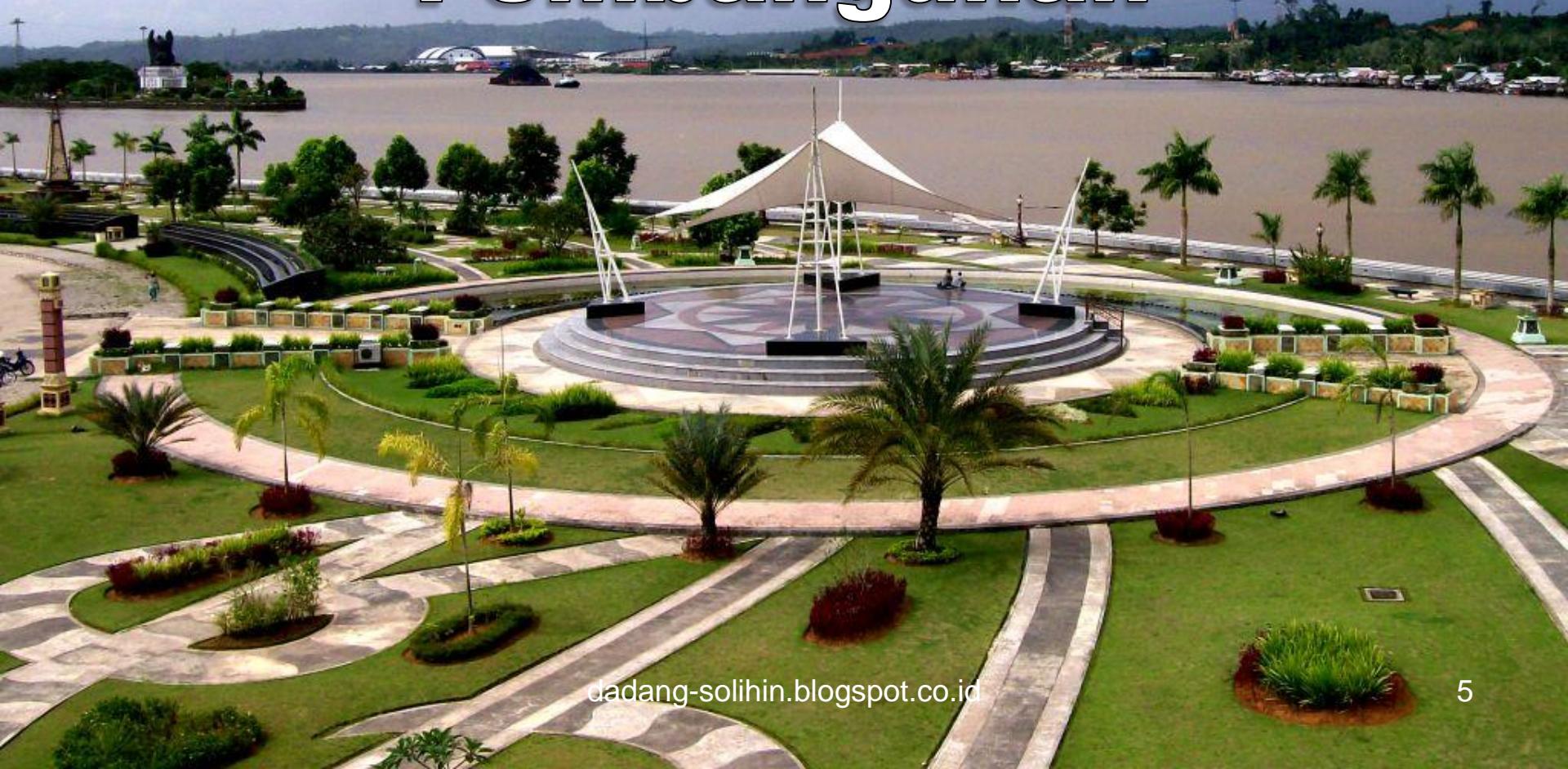
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN:  
Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di  
Indonesia  
oleh: Ginandjar Kartasasmita



- Sistem Administrasi Negara di Indonesia
- **Perencanaan Pembangunan di Indonesia**
- **Pembiayaan Pembangunan**
- Pelaksanaan Proyek Pembangunan
- **Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja**
- Pengawasan Pembangunan
- Administrasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan



# Tujuan dan Permasalahan Pembangunan



# Apa Itu Pembangunan?

**Pembangunan** adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

(Kartasasmita, 1997)

**Tujuan Pembangunan:**

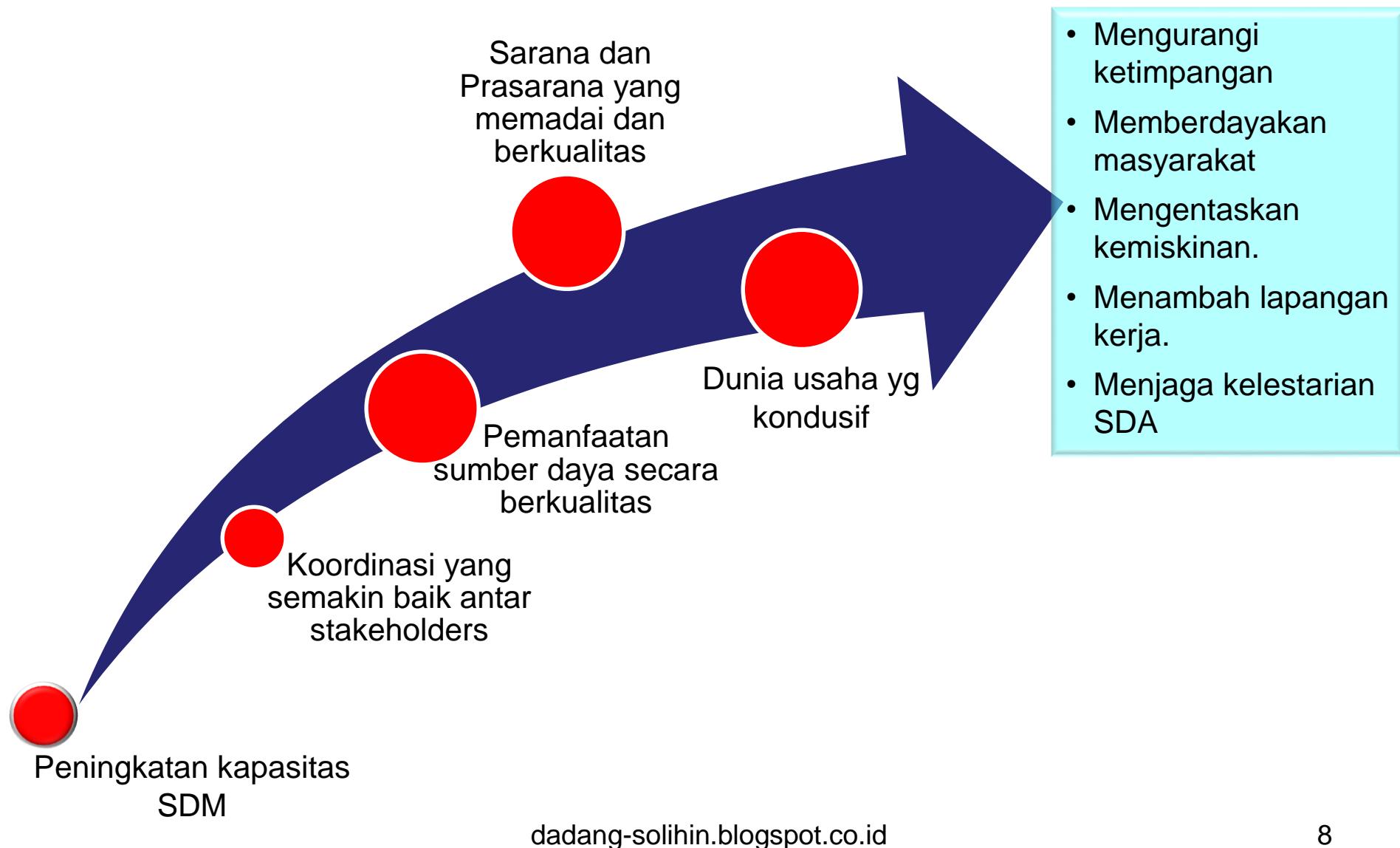
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

(Todaro, 2000)

# How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
  - antar daerah
  - antar sub daerah
  - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

# Tantangan dalam Pembangunan Daerah



## PEMBANGUNAN DAERAH



## PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

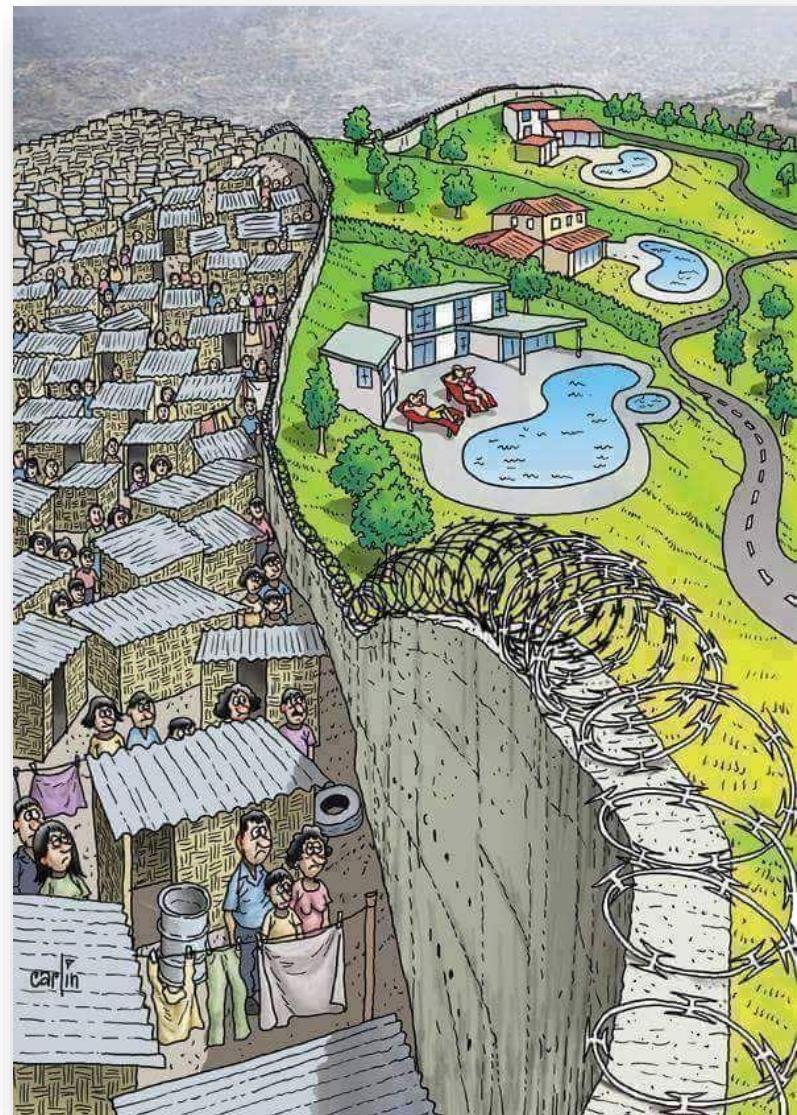
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

## PEMBANGUNAN JABAR



## PEMBANGUNAN DI JABAR



# PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi  
Daerah

Pengelolaan  
Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan  
menciptakan lingkungan  
politik dan hukum yang  
kondusif bagi unsur-  
unsur lain.

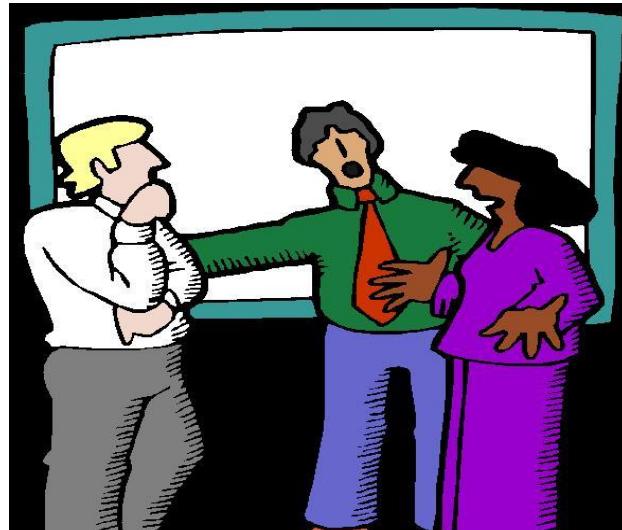
Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan  
lapangan kerja dan  
pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi  
sosial, ekonomi dan  
politik.

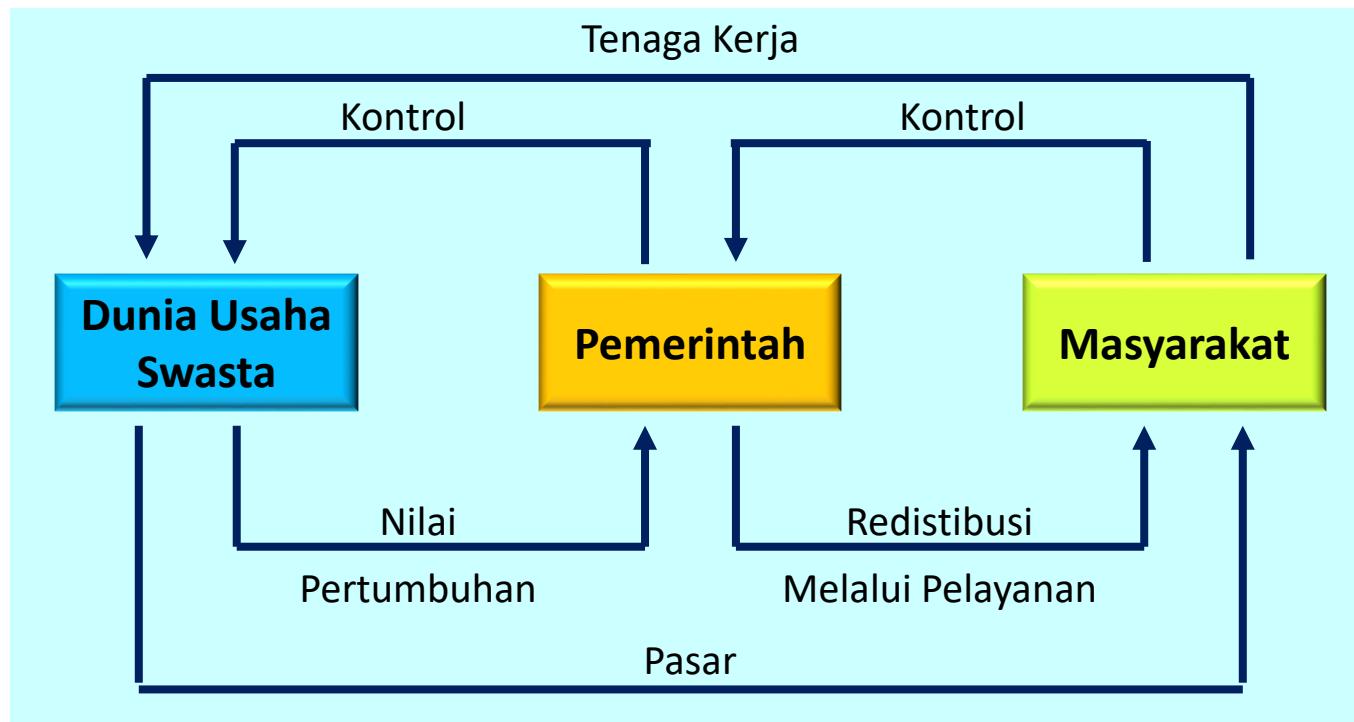
# Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



| Government  | Governance  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,</li><li>▪ Aktor di luaranya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, <i>civil society</i> dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.</li></ul> |

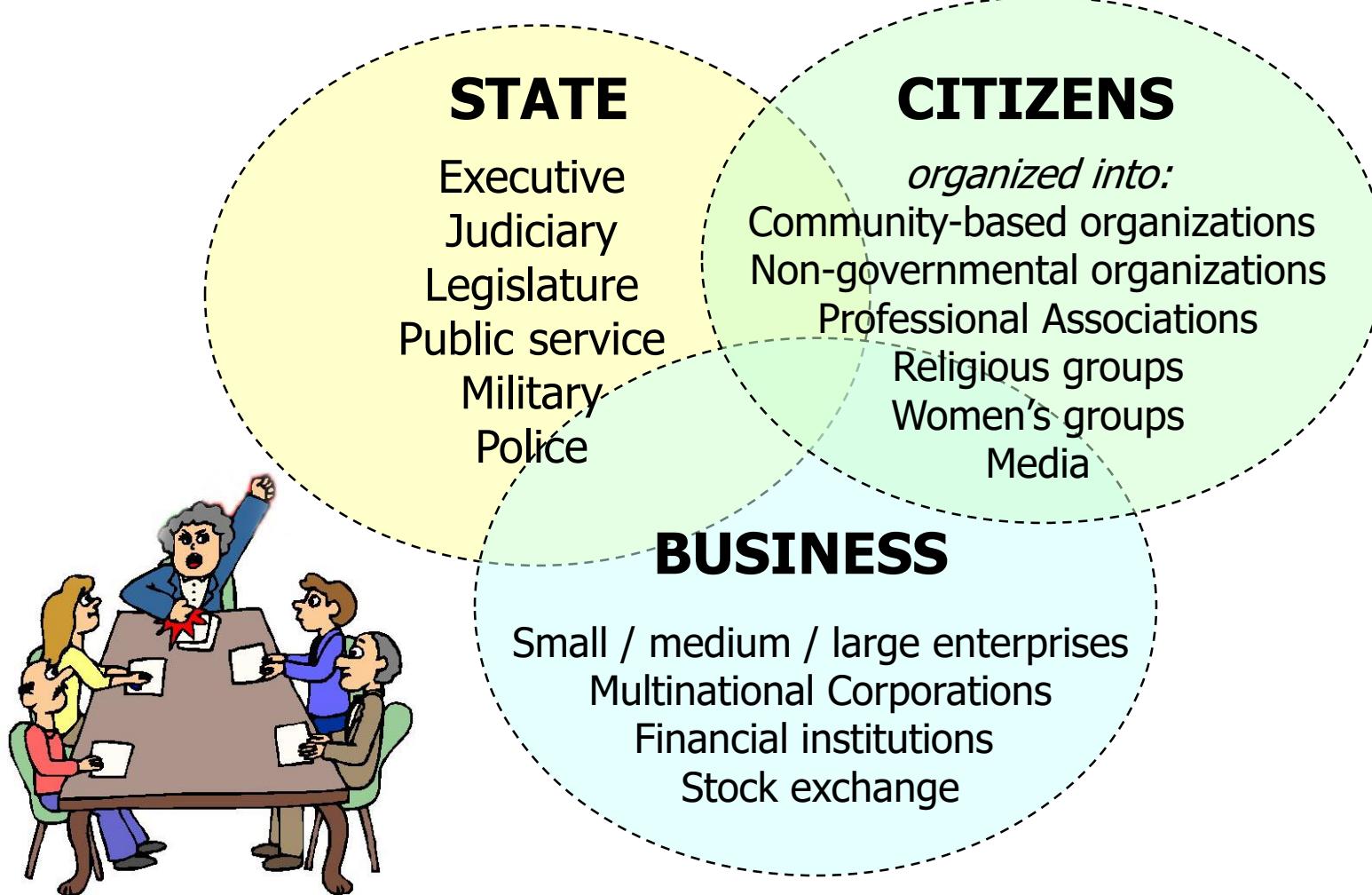
# Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

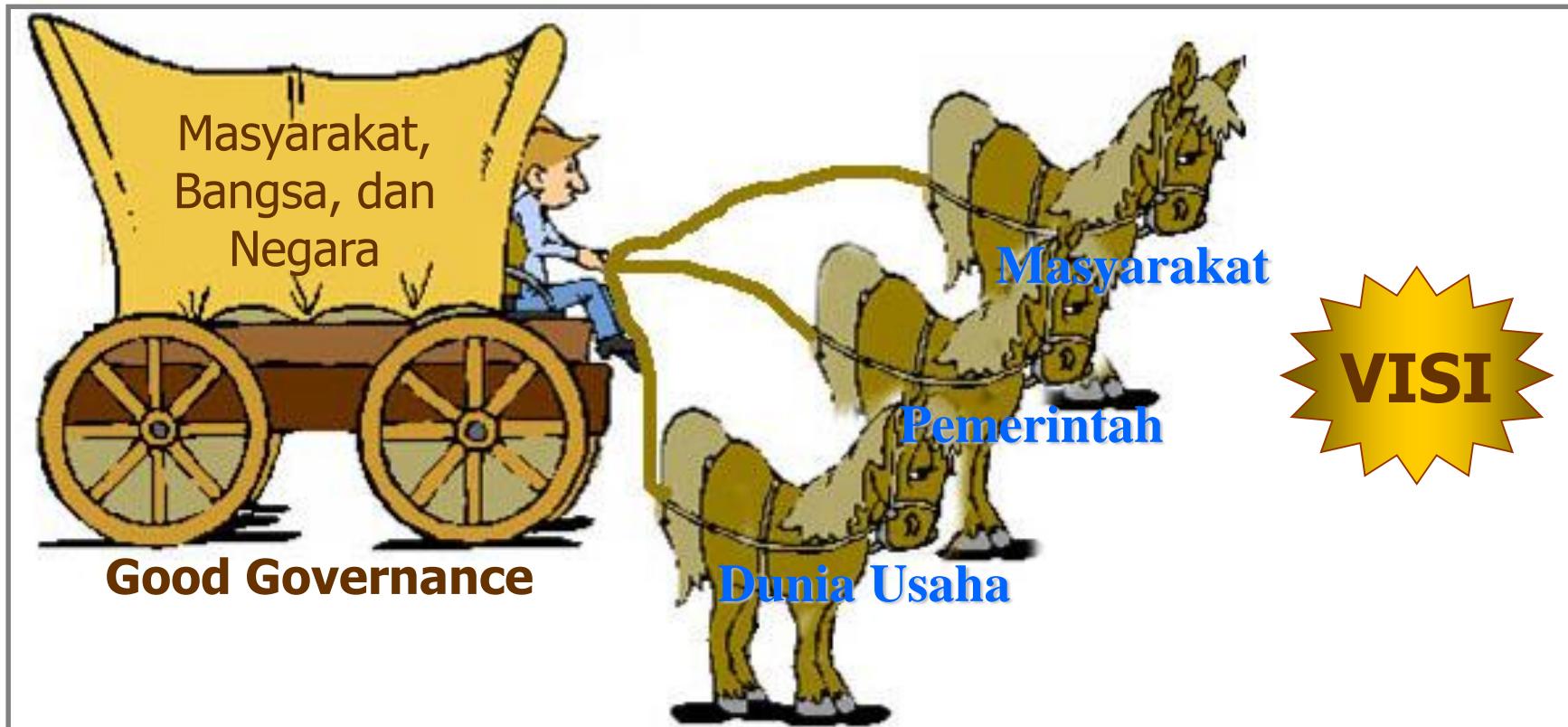
# Pelaku Pembangunan: Stakeholders



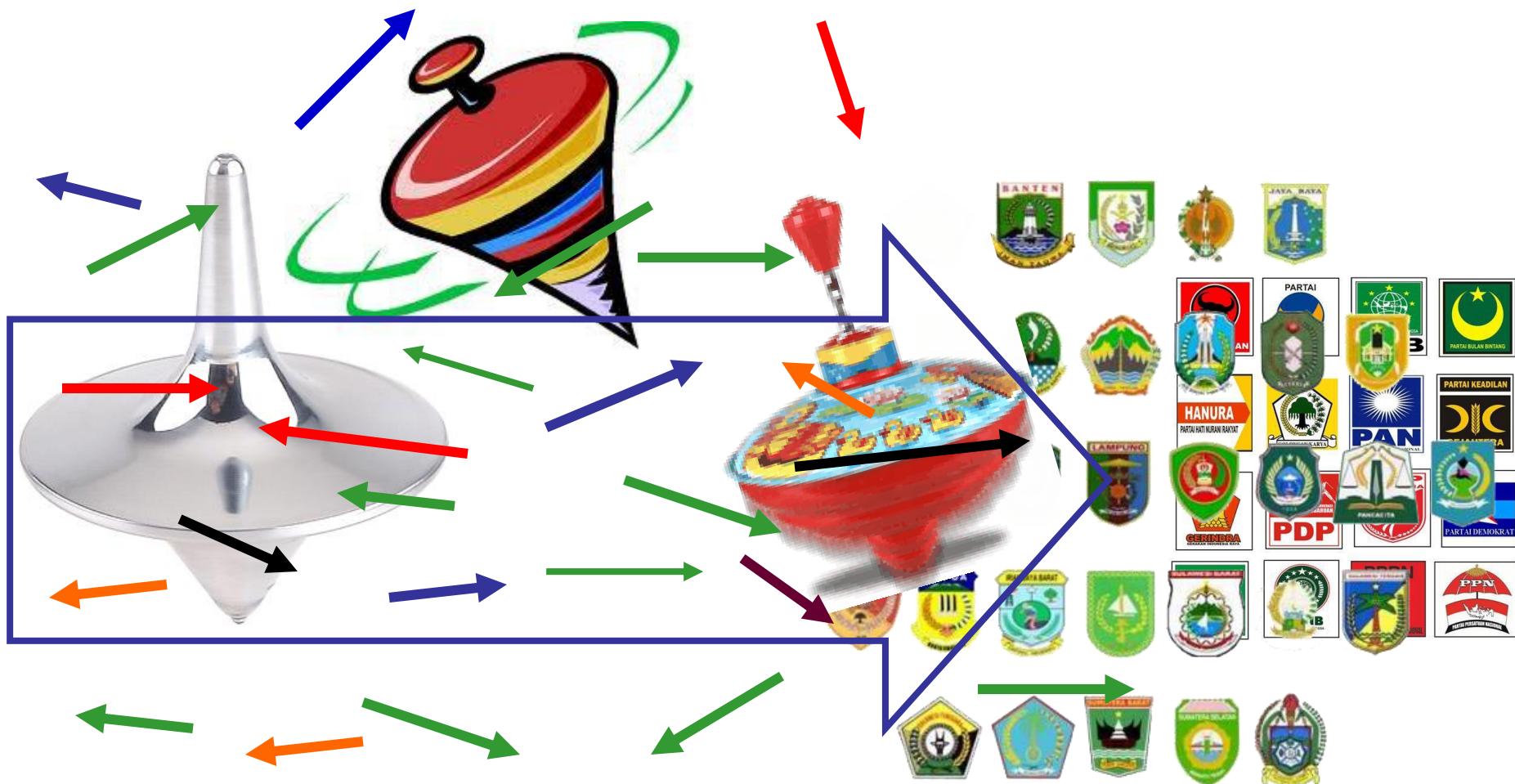
# Troika



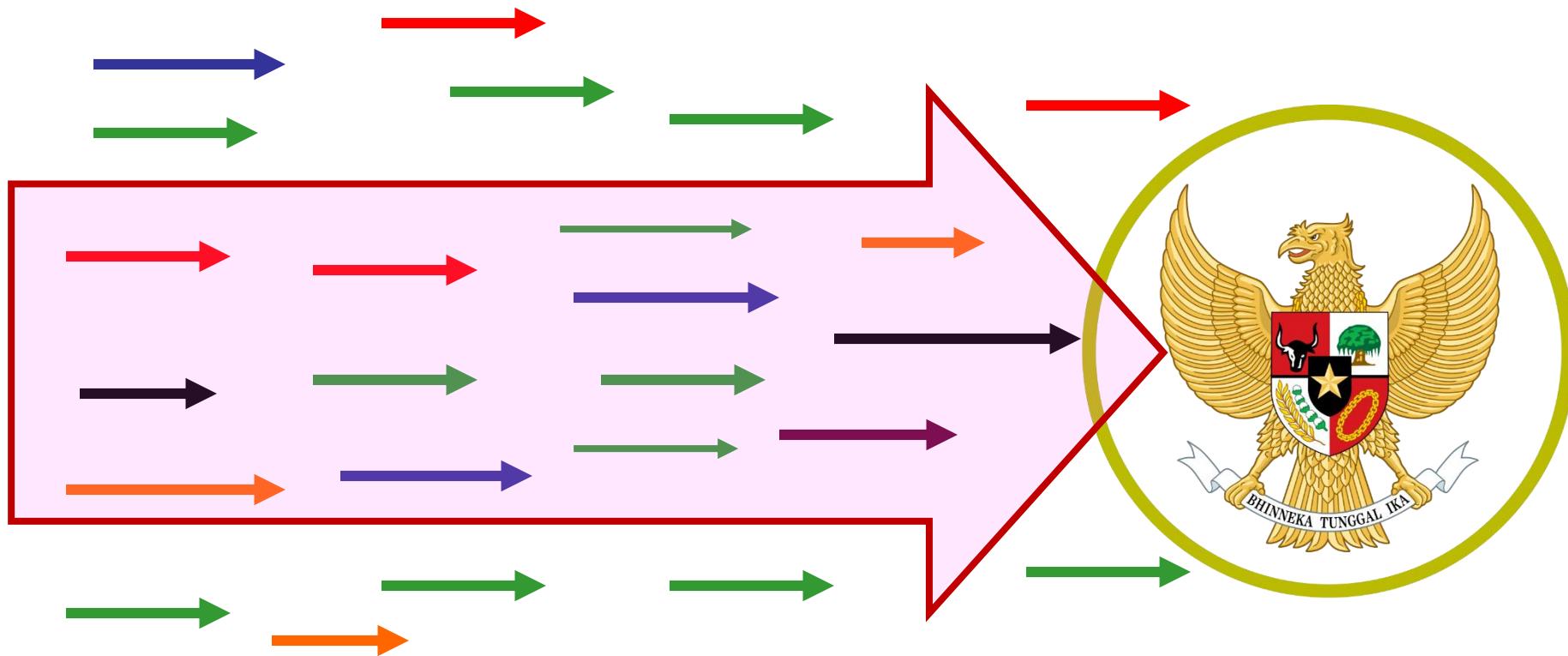
# Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



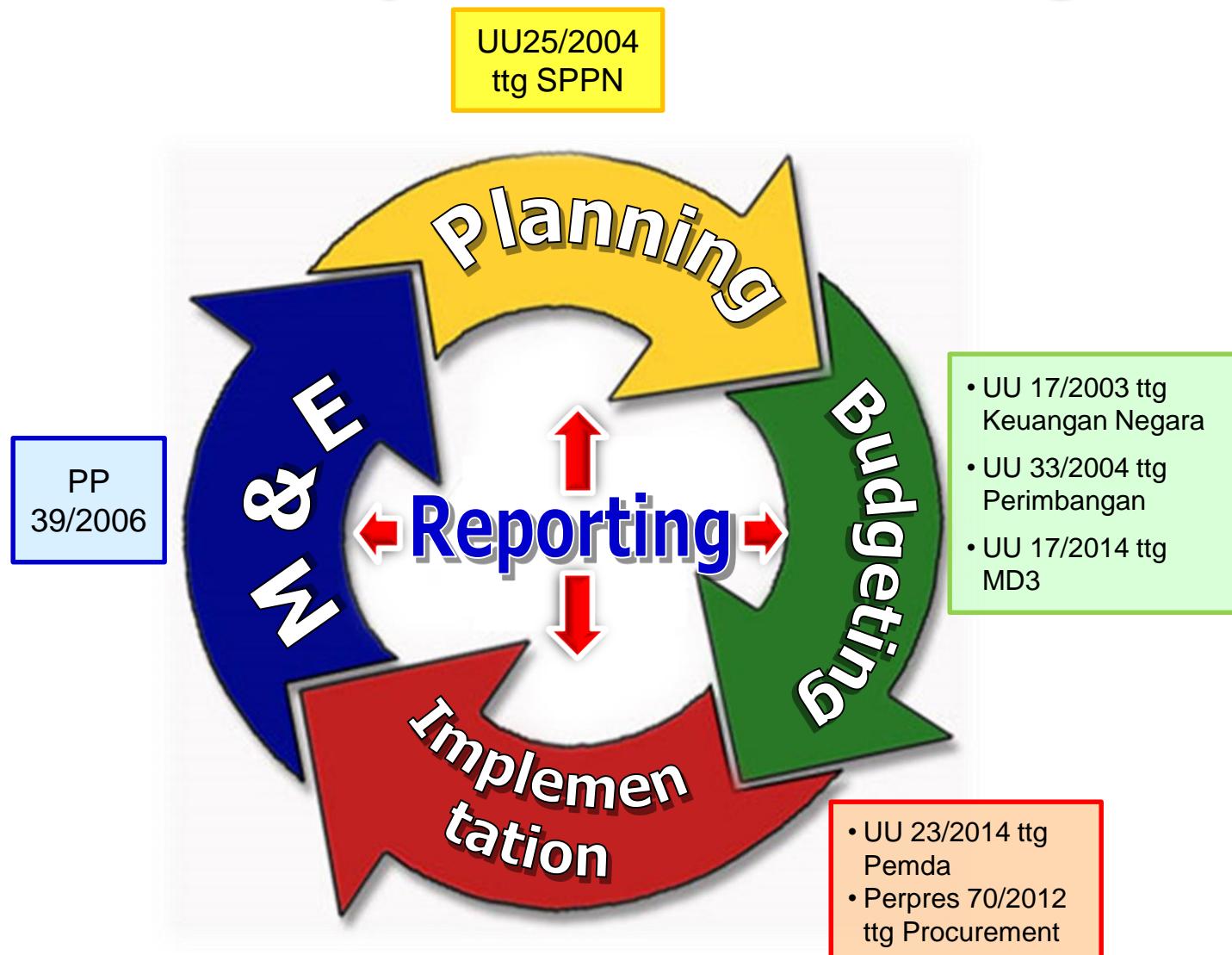
# **Sinergi Stakeholders**



# Sinergi Stakeholders yang Diharapkan



# Siklus Manajemen Pembangunan





# PLANNING



# UU25/2004 tentang SPPN

## SPPN adalah

- Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



# Proses Perencanaan Pembangunan Nasional



## Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penelan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



## Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



## Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



## Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

# Visionary Planning

GREAT PEOPLE  
THINK ABOUT  
THE FUTURE

AVERAGE PEOPLE  
FOCUS ON  
THE PAST

1,304,125 Views

dadang-solihin.blogspot.co.id

Bright Side

1:02

23

# Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



# Tujuan SPPN



1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



# Status Hukum Dokumen Perencanaan

| NASIONAL   |  | DAERAH   |   |
|--|--|--|---|
| Dokumen  | Penetapan                                | Dokumen  | Penetapan                                   |
| Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)  | UU<br>(Ps. 13 Ayat 1)                    | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)  | Perda<br>(Ps. 13 Ayat 2)                    |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) | Per Pres<br>(Ps. 19 Ayat 1)              | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) | Peraturan KDH<br>(Ps. 19 Ayat 3)            |
| Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)                   | Peraturan Pimpinan KL<br>(Ps. 19 Ayat 2) | Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)     | Peraturan Pimpinan SKPD<br>(Ps. 19 Ayat 4)  |
| Rencana Kerja Pemerintah (RKP)                               | Per Pres<br>(Ps. 26 Ayat 1)              | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                   | Peraturan KDH<br>(Ps. 26 Ayat 2)            |
| Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)               | Peraturan Pimpinan KL<br>(Ps. 21 Ayat 1) | Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) | Peraturan Pimpinan SKPD<br>( Ps. 21 Ayat 3) |

# Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





### UUD 45 (VISI MISI ABADI)

#### VISI

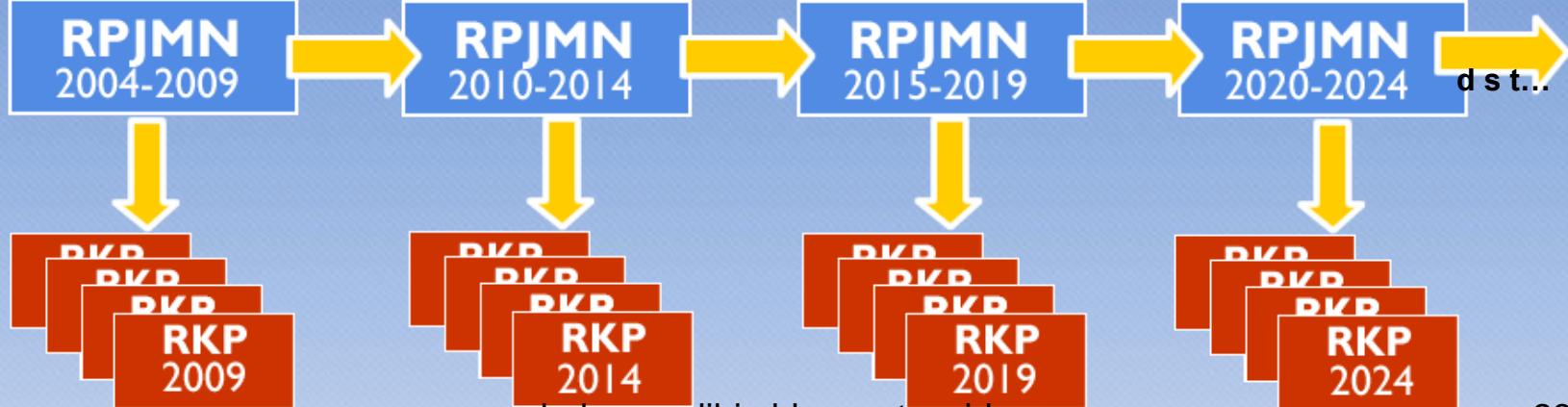
Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

#### MISI

- Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
- Memajukan Kesejahteraan Umum
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Ikut Melaksanakan Kemerdekaan Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan

d s t...  
d s t...

#### RPJPN (Visi Misi Interim, 2005-2025)



dadang-solihin.blogspot.co.id



# VISI INDONESIA 2025

## "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"

### Mandiri

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

### Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

### Adil

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

### Makmur

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.



## MISI PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional



## TAHAPAN PEMBANGUNAN



# Struktur RPJMN 2015-2019

## VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA

9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam  
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam  
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam  
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

# Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

# **9 Agenda Prioritas - NAWACITA**

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

# Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



# Strategi Pembangunan Nasional

## NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Pendidikan
- Kesehatan
- Perumahan
- Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

- Antarkelompok Pendapatan
- Antarwilayah:
  - (1) Desa,
  - (2) Pinggiran,
  - (3) Luar Jawa,
  - (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

# Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
  1. Kedaulatan Pangan
  2. Kedaulatan Energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi Mental
  7. Kawasan Perbatasan.





# Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

# Penyelarasan Sasaran Makro

| Indikator            | Target RPJMD | Target RPJMN |
|----------------------|--------------|--------------|
| Pertumbuhan Ekonomi  |              |              |
| Tingkat Pengangguran |              |              |
| Tingkat Kemiskinan   |              |              |



# Penyelarasan Sasaran Pokok

| Sasaran  | Ya | Tidak | Target RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|--|----|-------|--------------|---|
| <b>I. Sasaran Makro</b>  |    |       |              |   |
| Pembangunan Manusia dan Masyarakat   |    |       |              |   |
| 1. Indeks Pembangunan Manusia  |    |       |              |   |
| 2. Indeks Pembangunan Masyarakat   |    |       |              |   |
| 3. Indeks Gini   |    |       |              |   |
| 4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan |    |       |              |   |
| 4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan  |    |       |              |   |
| - Pekerja Formal   |    |       |              |   |
| - Pekerja Informal   |    |       |              |   |
| Dst...   |    |       |              |   |

# Penyelarasan Strategi

- Penyelarasan Strategi (RPJMD) terhadap Tema Pengembangan Wilayah (RJMN)

| Wilayah | Tema Pengembangan   | Strategi Pembangunan Daerah |
|---------|---|-----------------------------|
| Papua   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;</li><li>• Dst ...</li></ul> |                             |
| Maluku  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional</li><li>• Dst ...</li></ul>   |                             |
| dst...  |   |                             |

# Penyelarasan Arah Kebijakan

- Penyelarasan arah kebijakan (RPJMD) terhadap Tujuan pengembangan wilayah (RPJMN)

| Wilayah       | Tujuan Pengembangan  | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Nusa Tenggara | <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga;</li><li>b. penyediaan infrastruktur wilayah;</li><li>c. dst</li></ul> |                                   |
| Sulawesi      | <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari;</li><li>b. dst</li></ul>                                  |                                   |
| Sumatera      | <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;</li><li>b. Dst...</li></ul>  |                                   |
| Dst...        |  |                                   |

# Indikasi Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Jawa Barat 2015-2019

| No. | Kawasan Industri | Kabupaten  | Luas       | Komoditi Utama             |
|-----|------------------|------------|------------|----------------------------|
| 1   | Cilamaya         | Karawang   | 3.100,0 Ha | Otomotif dan Permesinan    |
| 2   | Majalengka       | Majalengka | 877,0 Ha   | Tekstil dan Produk Tekstil |
| 3   | Sukabumi         | Sukabumi   | 900 Ha     | Industri Alat Berat & Komp |
| 4   | Subang           | Subang     | 1000 Ha    | Otomotif dan Permesinan    |

# **Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019**

| Wilayah        | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) |      |      |      |      |
|----------------|------------------------------|------|------|------|------|
|                | 2015                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| DKI Jakarta    | 5.4                          | 6.5  | 7.2  | 7.3  | 7.9  |
| Jawa Barat     | 5.5                          | 6.6  | 7.1  | 7.8  | 7.7  |
| Banten         | 4.9                          | 5.6  | 6.4  | 6.8  | 7.7  |
| Jawa Tengah    | 5.7                          | 6.7  | 7.1  | 7.5  | 7.7  |
| D.I Yogyakarta | 5.3                          | 5.9  | 6.1  | 6.4  | 6.5  |
| Jawa Timur     | 6.2                          | 6.6  | 7.1  | 7.3  | 7.9  |
| Bali           | 7.5                          | 7.3  | 7.8  | 8.3  | 8.6  |

# **Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019**

| Wilayah        | Tingkat Kemiskinan (Persen) |      |      |      |      |
|----------------|-----------------------------|------|------|------|------|
|                | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| DKI Jakarta    | 3.4                         | 3.2  | 3.0  | 2.7  | 2.5  |
| Jawa Barat     | 8.9                         | 8.2  | 7.6  | 6.9  | 6.3  |
| Banten         | 5.3                         | 4.9  | 4.5  | 4.1  | 3.7  |
| Jawa Tengah    | 13.1                        | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 9.5  |
| D.I Yogyakarta | 13.8                        | 12.8 | 11.8 | 10.9 | 9.9  |
| Jawa Timur     | 12.0                        | 11.2 | 10.4 | 9.6  | 8.7  |
| Bali           | 4.0                         | 3.7  | 3.5  | 3.2  | 2.9  |

# Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

| Wilayah        | Tingkat Pengangguran (Persen) |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------------|------|------|------|------|
|                | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| DKI Jakarta    | 9.3                           | 9.1  | 8.8  | 8.5  | 8.3  |
| Jawa Barat     | 8.6                           | 8.3  | 8.0  | 7.7  | 7.4  |
| Banten         | 9.6                           | 9.2  | 8.8  | 8.4  | 8.0  |
| Jawa Tengah    | 5.4                           | 5.2  | 5.1  | 4.9  | 4.7  |
| D.I Yogyakarta | 3.8                           | 3.7  | 3.6  | 3.4  | 3.3  |
| Jawa Timur     | 4.0                           | 3.9  | 3.7  | 3.6  | 3.5  |
| Bali           | 1.9                           | 1.8  | 1.8  | 1.7  | 1.6  |

# Tabel 7.9

## Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Jawa Barat 2015-2019

| Pusat Kegiatan dalam RTRWN             |                           |      |
|--|---------------------------|------|
| PKN                                    | PKW                       | PKSN |
| Kawasan Perkotaan Jabodetabek (I/C/3)  | Pandeglang (II/B)         |      |
| Serang (I/C/1)                         | Rangkas Bitung (II/B)     |      |
| Cilegon (I/C/1)                        |                           |      |
| Kawasan Perkotaan Bandung Raya (I/C/3) | Sukabumi (I/C/1)          |      |
| Cirebon(I/C/1)                         | Cikampek – Cikopo (I/C/1) |      |
|  | Pelabuhanratu (II/C/2)    |      |
|  | Indramayu (II/C/1)        |      |
|  | Kadipaten (II/C/2)        |      |
|  | Tasikmalaya (I/C/1)       |      |
|  | Pangandaran (II/C/2)      |      |



# **Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN**

## **Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Barat**

# **Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang**

| <b>RPJMN</b>   | <b>RPJMD Jabar</b> | <b>RPJMD Cianjur</b> |
|--|--------------------|----------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten-Cirebon</li><li>2. Pembangunan Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang</li><li>3. Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi)</li><li>4. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam</li><li>5. Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai –Jatinegara – Bekasi - Cikarang</li><li>6. Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa</li></ol> |                    |                      |

# **Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang**

| <b>RPJMN</b>   | <b>RPJMD Jabar</b> | <b>RPJMD Cianjur</b> |
|--|--------------------|----------------------|
| 7. Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon<br>8. Elektrifikasi rei ganda KA Cikarang-Cikampek<br>9. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjung. Sari<br>10. Pembangunan jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati<br>11. Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati<br>12. Reaktivasi jalur KA antara Banjar –Kroya |                    |                      |

# **Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang**

| <b>RPJMN</b>  | <b>RPJMD Jabar</b> | <b>RPJMD Cianjur</b> |
|---|--------------------|----------------------|
| 13. Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang<br>14. Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS)<br>15. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang-Cikadongdong<br>16. Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong-Padalarang<br>17. Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang-Tenjo<br>18. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta-Ciganea<br>19. Pembangunan Jalur KA Elektrifikasi Citayam-Nambo |                    |                      |

# **Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang**

| <b>RPJMN</b>  | <b>RPJMD Jabar</b> | <b>RPJMD Cianjur</b> |
|---|--------------------|----------------------|
| 20. Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa<br>21. Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon<br>22. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari<br>23. Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage<br>24. Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung |                    |                      |

# Perhubungan Darat

| RPJMN   | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|---|----------------|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung*</li><li>2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor*</li><li>3. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi*</li><li>4. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok*</li><li>5. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi*</li><li>6. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya*</li></ol> |                |                  |

# Perhubungan Udara

| RPJMN  | RPJMD Jabar | RPJMD Cianjur |
|--|-------------|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Bandara Kertajati*</li><li>2. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran</li><li>3. Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon</li><li>4. Pembangunan Airstrip Pangandaran</li></ol> |             |               |

# Perhubungan Laut

| RPJMN  | RPJMD Jabar | RPJMD Cianjur |
|--|-------------|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Pelabuhan Pemanukan</li><li>2. Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan</li><li>3. Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon</li><li>4. Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak</li><li>5. Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi</li><li>6. Pengembangan Pelabuhan Pangandaran</li></ol> |             |               |

# Jalan

| RPJMN  | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|--|----------------|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi</li><li>2. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing</li><li>3. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan</li><li>4. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan</li><li>5. Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung</li><li>6. Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang</li><li>7. Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR)</li><li>8. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) dan Bulak Kapal (Bekasi)</li><li>9. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Keracondong</li><li>10. Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)</li></ol> |                |                  |

# Energi

| RPJMN                         | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 1. Pipa Cirebon-Bekasi 220 km |                |                  |

# Ketenagalistrikan

| RPJMN  | RPJMD Jabar | RPJMD Cianjur |
|--|-------------|---------------|
| 1. PLTGU Jawa-1 1600 MW<br>2. PS Upper Cisokan Pump Storage (FTP2) 1040 MW<br>3. PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW<br>4. PLTGU Muara Tawar Add-on 2,3,4 650 MW<br>5. PLTGU Peaker Jawa Bali -1 400 MW<br>6. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 300 MW<br>7. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW<br>8. PLTA Jatigede (FTP2) 110 MW<br>9. PLTP Patuha (FTP2) 110 MW<br>10. PLTP Tangkuban Perahu I (FTP2) 55 MW<br>11. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi |             |               |

# Telekomunikasi dan Informatika

| RPJMN  | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|--|----------------|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota</li><li>2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI</li></ol> |                |                  |

# **Sumber Daya Air**

| <b>RPJMN</b>  | <b>RPJMD<br/>Jabar</b> | <b>RPJMD<br/>Cianjur</b> |
|---|------------------------|--------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor</li><li>2. Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ)</li><li>3. Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor</li><li>4. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu</li><li>5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi</li><li>6. Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung</li><li>7. Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung</li><li>8. Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung</li></ol> |                        |                          |

# Sumber Daya Air

| RPJMN   | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|---|----------------|------------------|
| 9. Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung Kab. Karawang<br>10. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi<br>11. Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi<br>12. Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasaki Kec Cipunagara Subang<br>13. Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-559 Bandung<br>14. Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559) Bandung<br>15. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar s/d Nanjung Bandung |                |                  |

# Sumber Daya Air

| RPJMN   | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|---|----------------|------------------|
| 16. Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir<br>17. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara Gembong Bandung<br>18. Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor<br>19. Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung<br>20. Pembangunan Waduk Santosa Bandung<br>21. Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung<br>22. Pembangunan Waduk Cimeta Bandung<br>23. Pembangunan Waduk Sukawana Bandung<br>24. Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung |                |                  |

# Sumber Daya Air

| RPJMN  | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|--|----------------|------------------|
| 25. Pembangunan Waduk Citarik Bandung<br>26. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB - ICWRMIP) Karawang<br>27. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB - ICWRMIP) Bekasi<br>28. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi<br>29. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung<br>30. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut<br>31. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut |                |                  |

# Sumber Daya Air

| RPJMN   | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|---|----------------|------------------|
| 32. Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat<br>33. Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab. Pangandaran<br>34. Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran<br>Kab. Pangandaran<br>35. Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap<br>36. Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap<br>37. Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap |                |                  |

# Sumber Daya Air

| RPJMN  | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|--|----------------|------------------|
| 38. Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap<br>39. Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas<br>40. Pembangunan Saluran pembawa Air Baku dari Waduk Jatiluhur<br>41. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang. |                |                  |

# Air Minum

| RPJMN  | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|--|----------------|------------------|
| 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum<br>Pondok Gede Bekasi |                |                  |

# Sanitasi

| RPJMN   | RPJMD Jabar | RPJMD Cianjur |
|---|-------------|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (PLTSa Gedebage)</li><li>2. Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS Regional Nambo)</li><li>3. Pembangunan TPA Legok Nangka</li></ol> |             |               |

# Pendidikan

| RPJMN   | RPJMD Jabar | RPJMD Cianjur |
|---|-------------|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan gratis Sd, SLTP, SLTA diseluruh jawa barat, beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit</li><li>2. Pembangunan dan pengembangan SMK kelautan</li><li>3. BOS untuk SMA, SMK</li><li>4. Pendirian akademi komunitas</li><li>5. Penegerian Politeknik Negeri Subang</li></ol> |             |               |

# Kesehatan

| RPJMN  | RPJMD<br>Jabar | RPJMD<br>Cianjur |
|--|----------------|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan RS Pratama di Rancabuaya-Kab. Garut, Cidaun-Kab. Cianjur, Cipatujah-Kab. Tasikmalaya.</li><li>2. Pengembangan RS Daerah RSUD Garut, RSUD Cililin-Kab. Bandung, RSUD Sukabumi.</li></ol> |                |                  |

# Perumahan

| RPJMN  | RPJMD Jabar | RPJMD Cianjur |
|--|-------------|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (masyarakat berpenghasilan rendah / MBR)</li><li>2. Pembangunan perumahan dan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)</li><li>3. Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal) di Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Bodebek Karpur</li></ol> |             |               |

# Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
  1. Kedaulatan pangan
  2. Kedaulatan energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi mental
  7. Kawasan Perbatasan



# 1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;  
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;  
Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;  
Kemen Perindustrian;  
**Pemda**

Peningkatan  
kemampuan  
petani  
Pemb.  
Agribisnis  
kerakyatan

Bank Indonesia;  
Kemen Koperasi

Pendirian bank  
pertanian &  
UMKM

dadang-solihin.blogspot.co.id

Pembukaan  
1 juta lahan  
sawah baru  
Reforma agraria  
9 juta Ha

Perbaikan dan  
pemb. Jaringan  
irigasi,  
bendungan,  
pasar, dan  
sarpras  
transportasi

Kemen PU;  
Kementan  
Kemendag;  
**Pemda**

Stop konversi  
lahan produktif

**Pemda:**  
Kemen Agraria & TTR

BAPPENAS : KOORDINASI  
PERENCANAAN  
MENKO : KOORDINASI  
PELAKSANAAN  
**KEDAULATAN  
PANGAN**

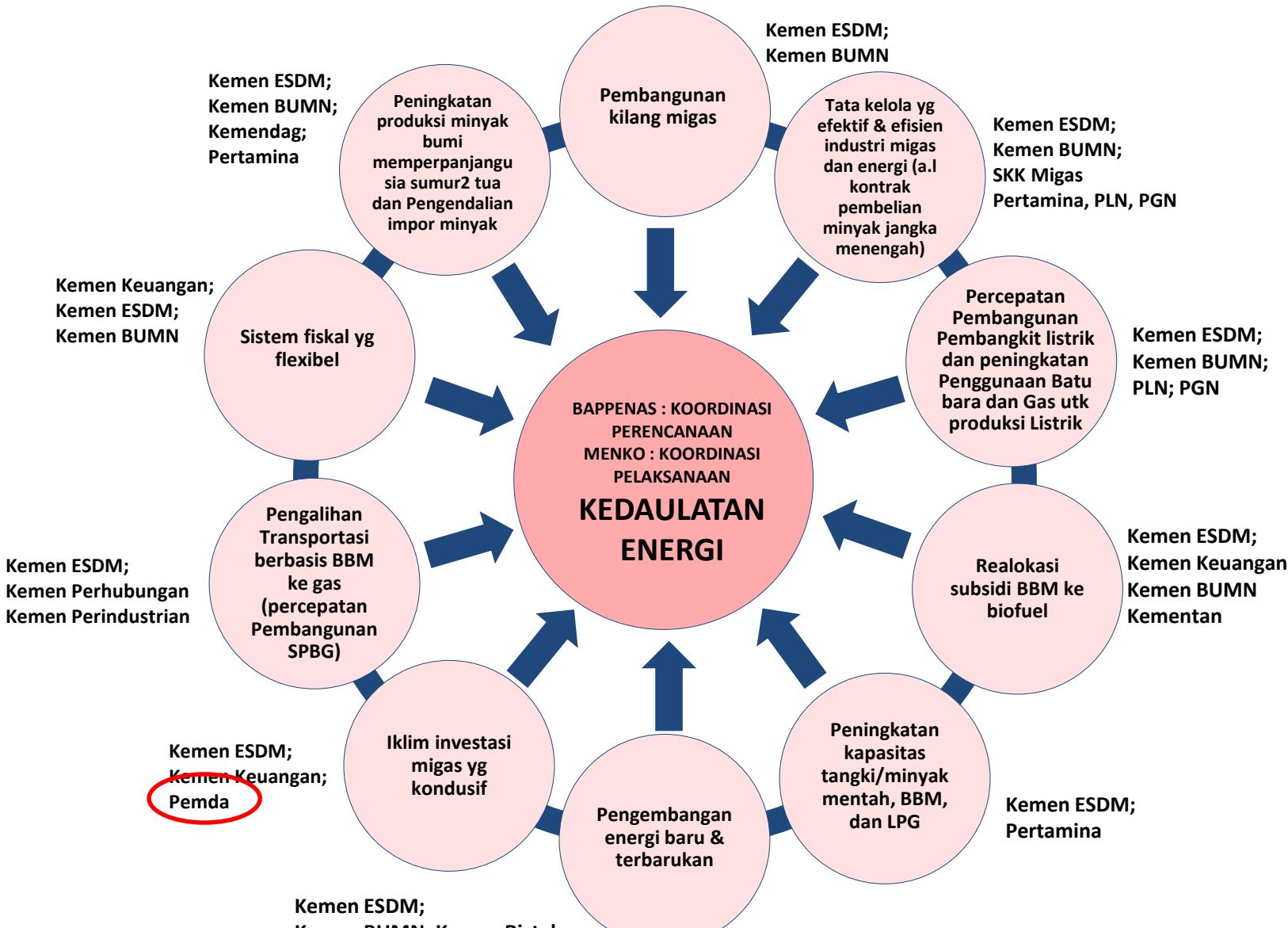
Gudang dgn  
fasilitas  
pengolahan  
pasca panen  
di sentra  
produksi;

Pemulihan  
kualitas  
kesuburan  
lahan; 1000  
Desa Mandiri  
Benih

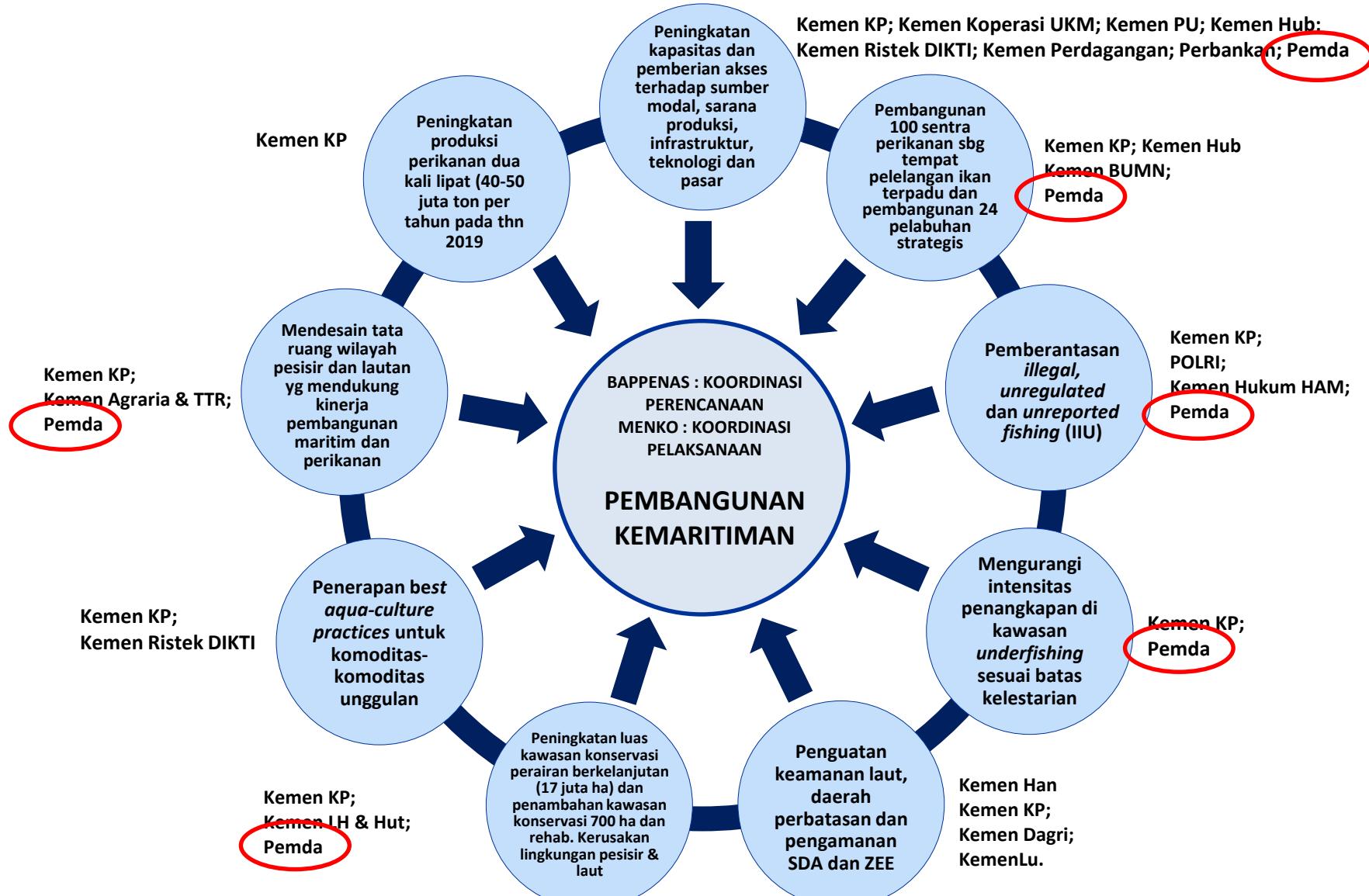
Kemen Pertanian;  
Kemen BUMN; **Pemda**

Kemen Pertanian;  
KLH/BPLH  
**Pemda (BUMDes- Dana Desa)**

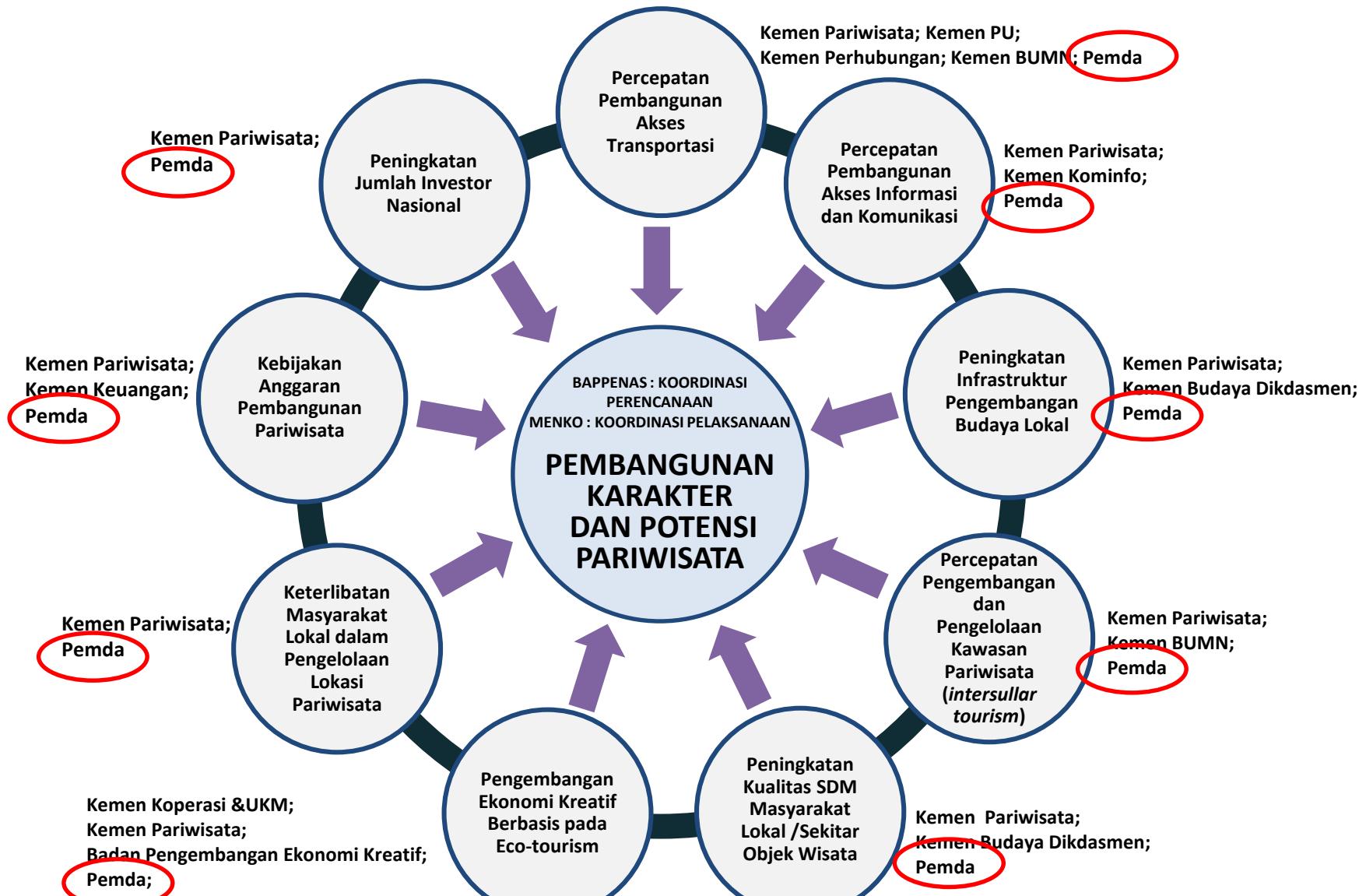
## 2. Kedaulatan Energi



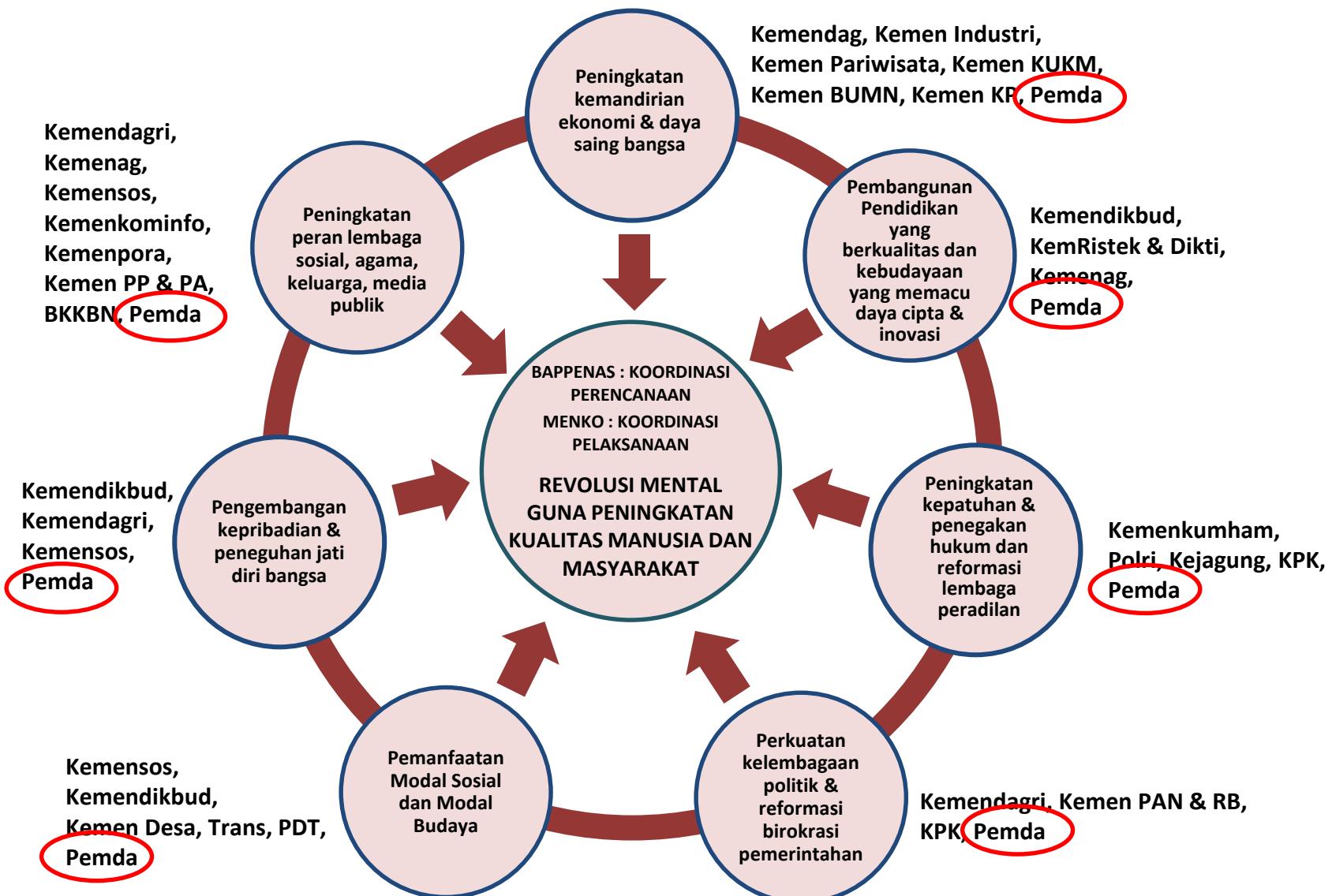
### 3. Kemaritiman



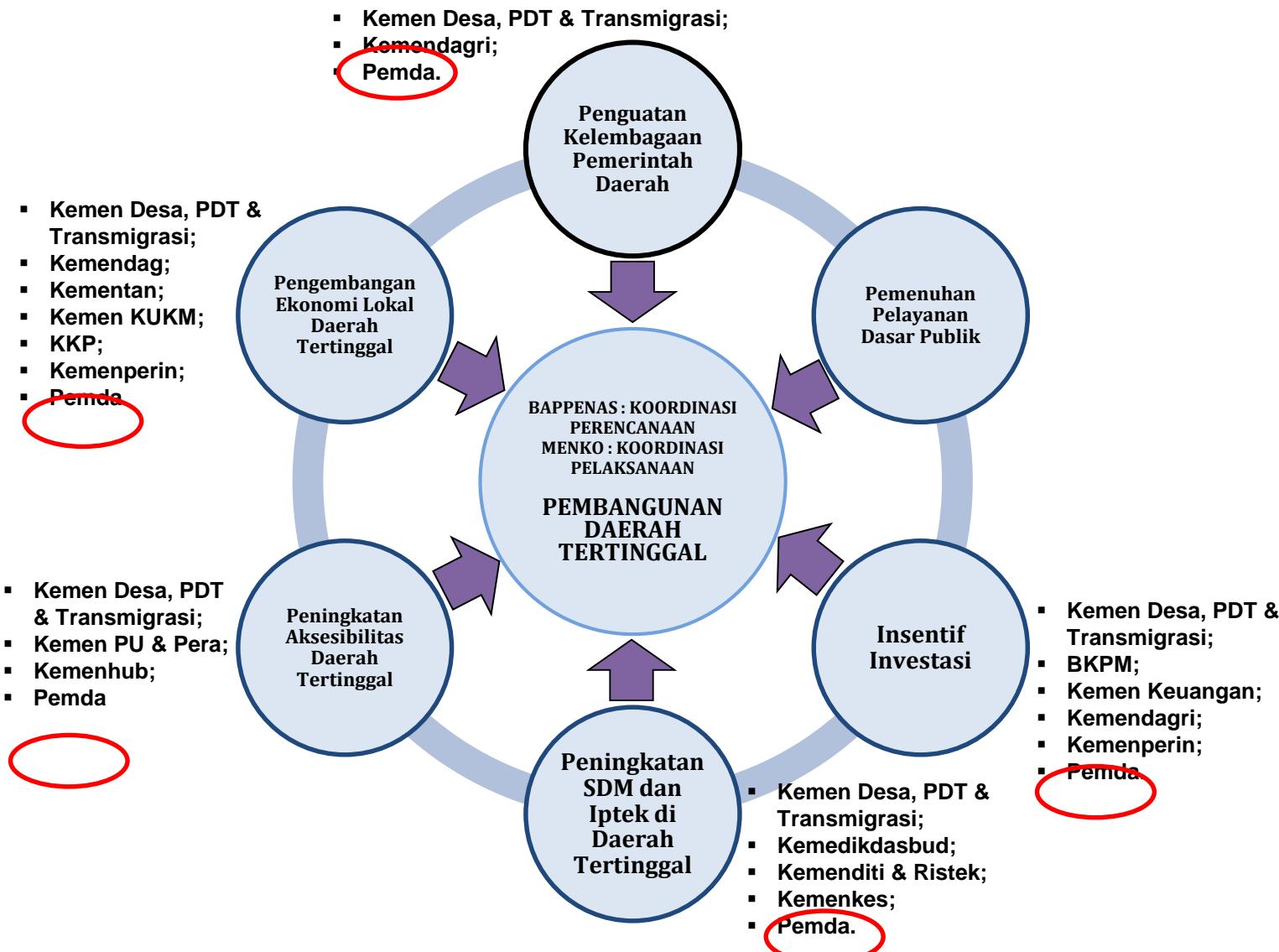
# 5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



# 6. Revolusi Mental



# Pembangunan Daerah Tertinggal



# Kegagalan Perencanaan

Sumber: Kartasasmita, 1996

# Kegagalan Perencanaan

## 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

- Informasinya kurang lengkap,
- Metodologinya belum dikuasai,
- Perencanaannya tidak realistik sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana,
- Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



# Kegagalan Perencanaan

## 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

- Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
- Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
- Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.



# Kegagalan Perencanaan

3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

- Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
- Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.



# Kegagalan Perencanaan

## 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

- Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
- Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
- Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (*centrally planned system*).



# Sistem Perencanaan yang Berhasil

- Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
- Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.
- Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.





# Perencanaan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).



# BUDGETTING

# Fungsi DPR/D menurut UU 27/2009

1.

Legislati

2.

Anggaran

3.

Pengawasan

# Reformasi Sistem Penganggaran

| PARADIGMA LAMA   | PARADIGMA BARU   |
|--|--|
| <p><b>Visi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN</li></ul> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan</li><li>▪ Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan</li></ul> | <p><b>Visi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih</li></ul> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D</li><li>▪ Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara</li></ul> |

UU 17/2003

# Reformasi Sistem Penganggaran

## Paradigma Lama

### Penganggaran Berbasis:

1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan

## Paradigma Baru

### Penganggaran dengan Pendekatan:

1. Penganggaran Berbasis Kinerja
2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu

# Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

## Tujuan

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

## Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*Money follow function*).

# Syarat Penerapan PBK

## Indikator Kinerja



- Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome);
- Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efektivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
- Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

## Standar Biaya



- Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
- Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
- Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

## Evaluasi Kinerja



- Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;
- Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;
- Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

# Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

## Tujuan

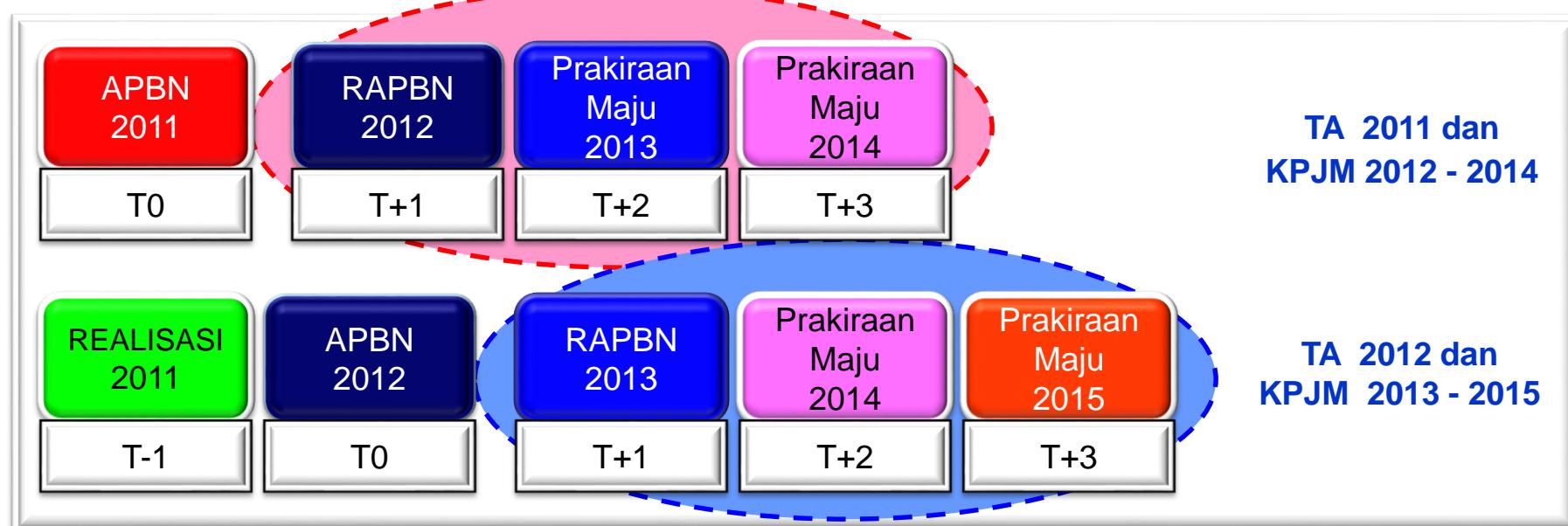
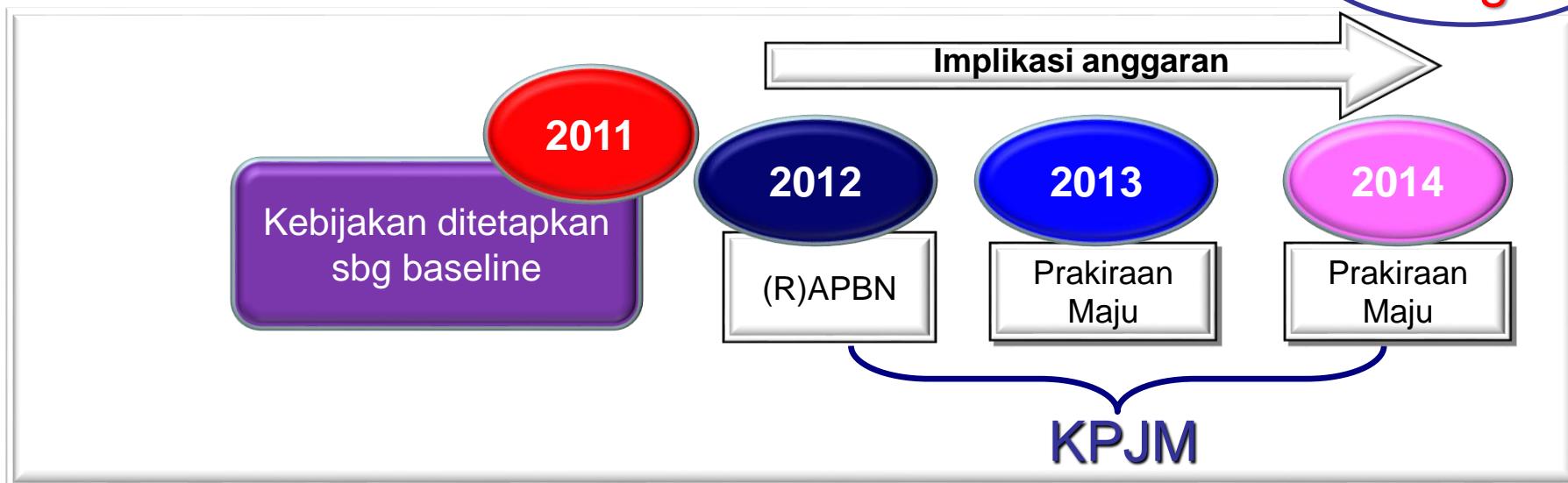
1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (*allocative efficiency*)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (*to improve quality of planning*)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (*best policy option*)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (*fiscal discipline*)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*)

## Landasan Konseptual

1. Penerapan sistem *rolling budget*
2. Mempunyai *baseline* (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (*additional budget for new initiatives*)

# KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

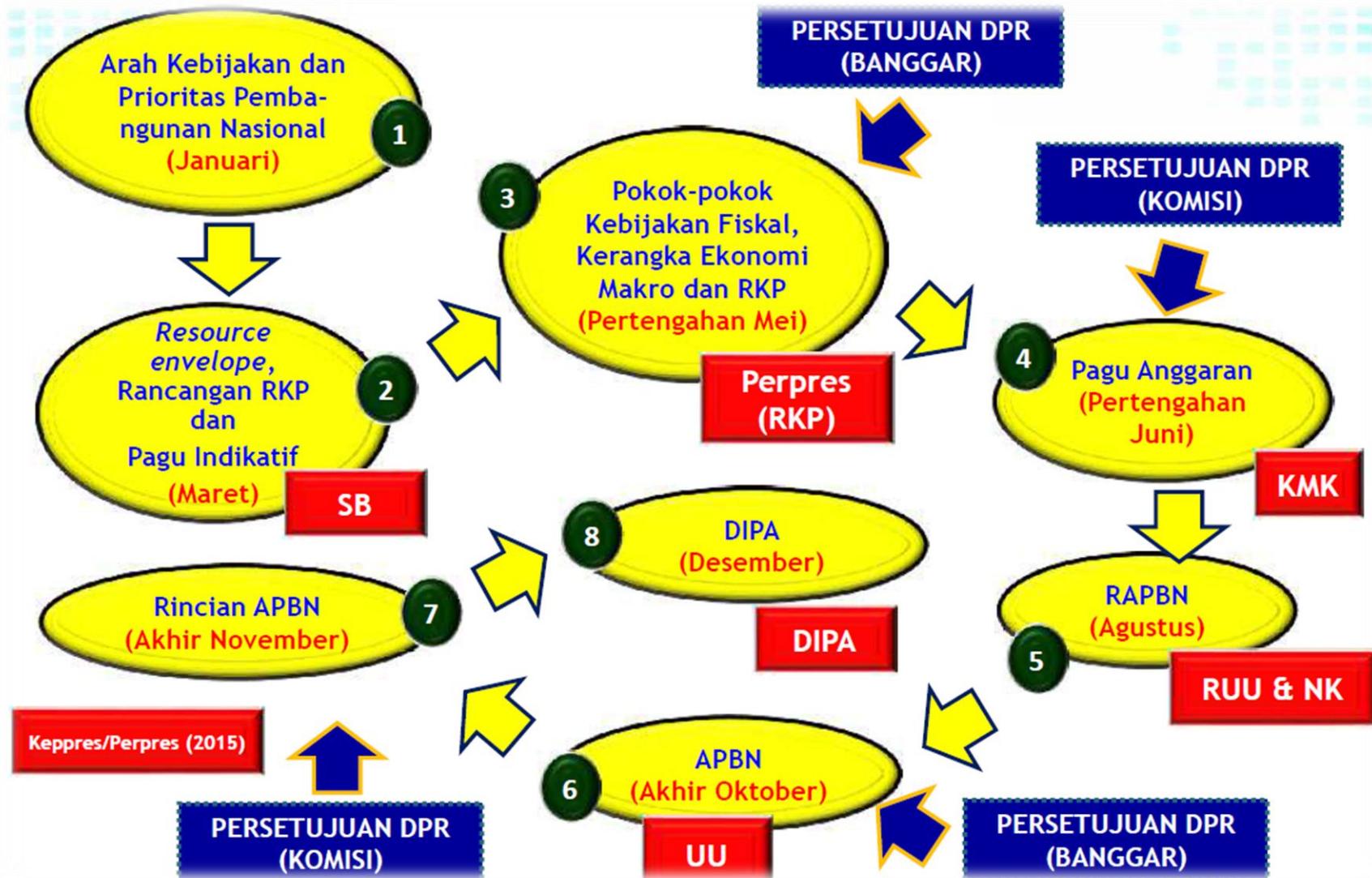
Rolling  
Budget



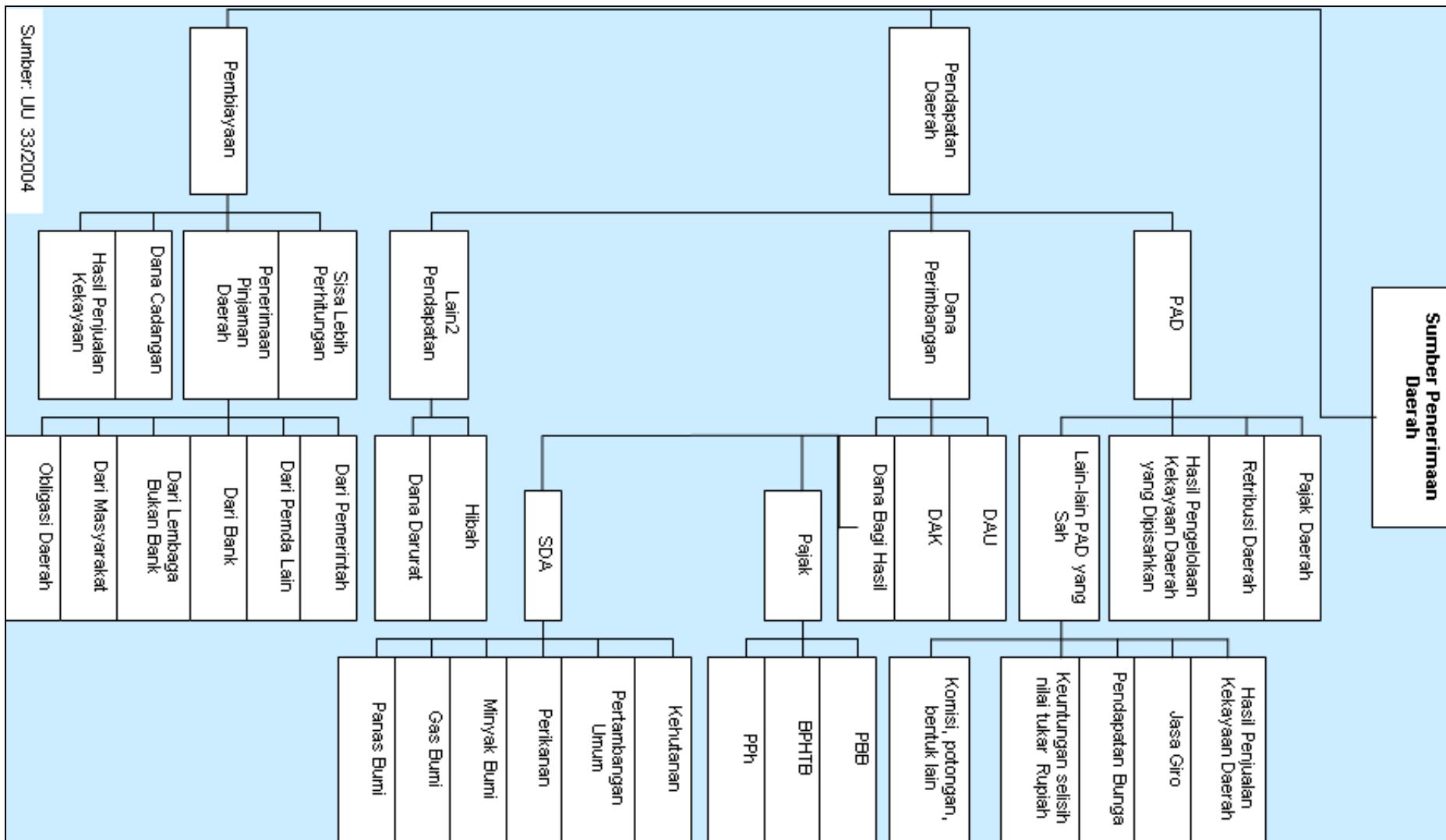
# Penganggaran Secara Terpadu

- Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
- Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
- Dalam kaitan dengan menghitung biaya *input* dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

# Proses Penyusunan RAPBN



# **Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah**





# IMPLEMENTATION

# Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi

## (Teori Implementasi Edward III)

### 1. Komunikasi

- Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
- Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.



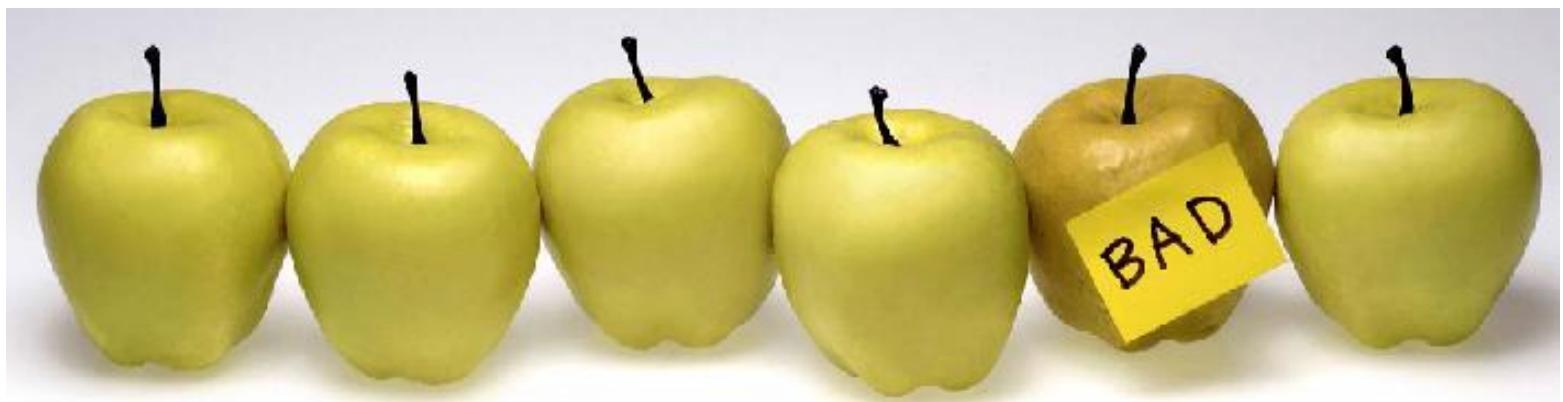
## 2. Sumber Daya

- Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
- Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.



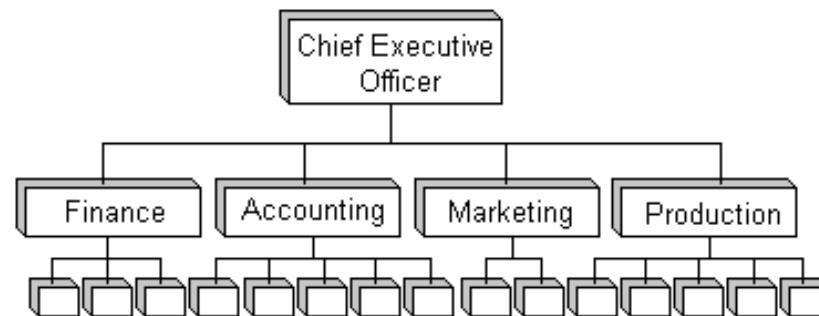
### 3. Disposisi

- Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.



## 4. Struktur Birokrasi

- Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
- Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP).
- SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
- Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
- Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.





# Praktek Korupsi di Indonesia

Sumber: PPATK, 2013

# Korupsi sebagai Kejahatan

| Persepsi   | Kapan Kejahatan (Crime) Korupsi Terjadi ?   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Korupsi sbg kebiasaan ( ini yg selama ini terjadi, sehingga merusak moral bangsa )</li><li>• Korupsi sbg mismanagement (ini yg di masa lalu dianuti, sehingga negara dirugikan)</li><li>• Korupsi sbg kejahatan (ini yg harus kita kembangkan)</li></ul> | <p><b>Manakala bertemu ny unsur-unsur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Niat untuk melakukan (desire to act )</li><li>• Kemampuan untuk melakukan (ability to act )</li><li>• Peluang / kesempatan (opportunity )</li><li>• Target yang cocok (suitable target )</li></ul> |

catatan :

penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.

# Kendala Pengungkapan TPK

- Kejahatan yang terorganisir, dalam beberapa kasus melibatkan pejabat/aparat
- Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan
- Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai alat bukti
- Locus delicti bersifat lintas batas negara
- Alat/sarana kejahatan semakin canggih
- Hukum seringkali tertinggal dari kejahatan

# Proses Pencucian Uang

## 1. Placement

- Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan

## 2. Layering

- Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

## 3. Integration

- Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman

# Modus Pencucian Uang

## 1. Smurfing

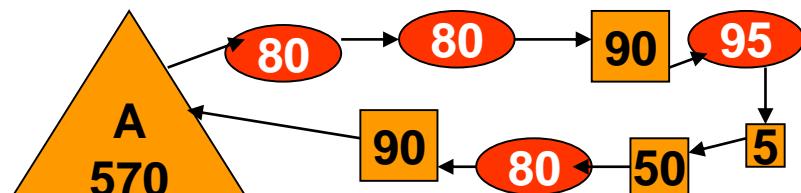
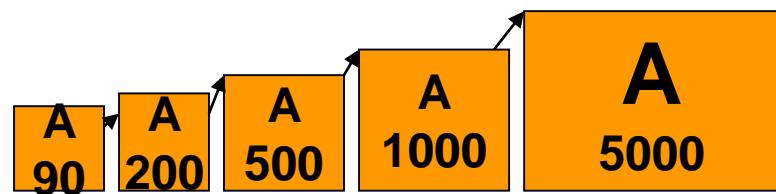
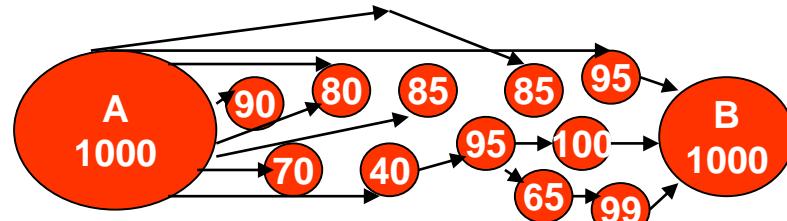
- Memecah-mecah transaksi dari sejumlah besar uang menjadi kecil-kecil

## 2. Structuring

- Melakukan transaksi dari yang semula berjumlah kecil makin lama semakin besar di bawah batas minimum pelaporan.

## 3. U-turn

- Memutar balikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.



# Paradigma Baru Memberantas Kejahatan

- Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE BLOOD” kejahatan.
- “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan.
- Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat.
- Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk digunakan.
- Kesulitan mendekripsi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”).
- Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).



# MONEV



# Monev?



+ 30 Laws  
and Regulations  
regarding M&E

# Definisi Monitoring



- **Monitoring** secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain:
  - Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output)
  - Pelaporan tentang kemajuan
  - Identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.

# Definisi Evaluasi



- Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
- Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)

# Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan

- Excellent
- Very good
- Good
- Average
- Poor

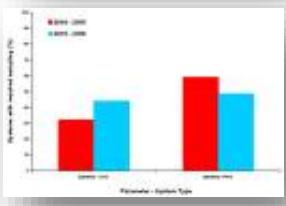
## Tahap Perencanaan (ex-ante):

- dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
- untuk memilih dan menentukan:
  1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
  2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya



## Tahap Pelaksanaan (on-going)

- Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
- Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
- Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program



## Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)

- dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
- untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
- untuk menilai:
  1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
  2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
  3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

# Pelaporan hasil Monev

| Terlalu Banyak<br>Regulasi   | Inefisiensi   |   |
|--|---|---|
|  | Biaya Pelaporan   | Penerima Laporan  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 7 UU</li><li>• 11 PP</li><li>• 1 Perpres</li><li>• 1 Inpres</li><li>• 2 Kepmen</li><li>• 4 Permendagri</li><li>• 20 Laporan K/L</li><li>• 58 Laporan (Pemda)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 74 K/L</li><li>• 653 Eselon I</li><li>• 11.240 Eselon II</li><li>• 33 Provinsi → 990 SKPD</li><li>• 441 Kab/Kota → 13.230 SKPD</li><li>• Diperkirakan kebutuhan kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton)</li><li>• Biaya antar .....? Berapa total biaya??</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bappenas = 8 Laporan</li><li>• Depkeu = 11 Laporan</li><li>• Depdagri = 20 Laporan</li><li>• Kemenpan = 4 Laporan</li><li>• BPK = 8 Laporan</li><li>• Presiden = 20 Laporan</li><li>• LAN = 1 Laporan</li><li>• K/L = 5 Laporan</li></ul> |

# Gambaran Sistem M&E

## Sekarang

- Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan
  - Kemdagri
  - LAN
  - Menpan
  - Kemkeu
  - Bappenas
  - Setneg
  - K/L terkait
- Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi
- Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
- Evaluasi top-down
- Evaluasi fragmentasi 1 waktu
- Evaluasi pasif
- Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi



## Akan Datang

- Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah
- Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif
- Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
- Lebih efisien dan biaya rendah
- Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up
- Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi
- Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
- Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi
- Adanya komunitas evaluator



# Terima Kasih